



**SALINAN**

**PERATURAN KALURAHAN  
KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 07 TAHUN 2022**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**



LURAH TAMANTIRTO  
KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO

NOMOR 07 TAHUN 2022

T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TAMANTIRTO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);



14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Tni Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti Tni Pemberdayaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 4);

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 180);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 14);

27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa diKalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
31. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2018);
32. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tamantirto Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019);
33. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa , Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 10 Tahun 2019);
34. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 16);
35. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 17);
36. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 5);

37. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan ,Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan ,Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 17);
38. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 15);
39. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 05 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 16).



Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO  
dan  
LURAH TAMANTIRTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan  
perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan

a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp. 74.700.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp. 5.021.238.799,00
c. Pendapatan Lain-Lain	<u>Rp. 20.500.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Kalurahan	Rp. 5.116.438.799,00

2. Belanja Kalurahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp. 2.466.908.148,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 2.194.299.198,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 451.215.400,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 523.535.925,30
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	<u>Rp. 478.195.361,70</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 6.114.154.033,00</u>

Defisit Rp. 997.715.234,00

3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan	
• Silpa 2022 (Perkiraan)	Rp. 1.072.715.234,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 75.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 997.715.234,00
4. Surplus/Defisit	<u>Rp. 0,00</u>



## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat  
a. APBKalurahan;

## Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan;
  - e. berskala lokal Kalurahan.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

## Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tamantirto.

Ditetapkan di Tamantirto

Pada tanggal 29 Desember 2022

LURAH TAMANTIRTO,  
  
WISNU ARDI

Diundangkan di Tamantirto

Pada tanggal 29 Desember 2022

CARIK TAMANTIRTO



SUHARTO

LEMBARAN KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 18

Noreg Peraturan Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan

Kabupaten Bantul : (26/Tamantirto/2022)

Salinan sesuai aslinya

An Carik Tamantirto

Kepala Urusan Pangripta,

  
ANNAAS SULISTYA BUDI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
PEMERINTAH KALURAHAN TAMANTIRTO  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	74.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5.021.238.799,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5.116.438.799,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<u>1</u>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>2.466.908.148,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.864.075.926,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	67.295.520,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	67.295.520,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	674.374.068,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	674.374.068,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.932.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	10.932.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	360.289.310,00	ADD, DDS, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	360.289.310,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	132.300.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	132.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	19.735.818,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.735.818,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	90.450.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.450.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuska dan LKK	48.413.666,00	ADD, DLL
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	48.413.666,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuska	95.964.644,00	PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	95.964.644,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuska	11.040.900,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	11.040.900,00	
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	118.056.000,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	118.056.000,00	
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorir	235.224.000,00	ADD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	235.224.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	60.890.591,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.280.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.280.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	44.610.591,00	DLL, PAD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.185.500,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	13.425.091,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	115.766.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	48.720.000,00	DDS, PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.720.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.810.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.810.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	61.236.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.236.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	247.577.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.531.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.531.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembuk desa Non Reguler)	26.204.500,00	ADD, DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.204.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	27.547.000,00	ADD, DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.547.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	26.779.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.779.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	12.994.500,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.994.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	14.567.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.567.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	26.733.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.733.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	33.741.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.741.000,00	
1.4.90		Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorar	67.240.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.240.000,00	
1.4.94		Fasilitas Pendampingan Bantuan Keuangan	6.240.000,00	PBK
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	178.598.631,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	45.570.000,00	PBH



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	45.570.000,00	
1.5.90		Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	112.840.631,00	DLL
1.5.90	5.3	Belanja Modal	112.840.631,00	
1.5.91		Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	7.133.000,00	DLL
1.5.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.133.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	13.055.000,00	PAD
1.5.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.055.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b>2.194.299.199,00</b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>260.744.979,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	90.639.700,00	BMP, DOS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	90.639.700,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	158.611.279,00	BMP, DOS, PBK
2.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	93.266.000,00	
2.1.06	5.3	Belanja Modal	65.345.279,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4.160.000,00	PAD
2.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7.334.000,00	DOS
2.1.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.334.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>667.014.670,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	150.337.200,00	DOS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	150.337.200,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	25.679.970,00	BMP, DOS
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.679.970,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	46.705.500,00	DOS
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	46.705.500,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	332.152.000,00	BMP
2.2.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	332.152.000,00	
2.2.92		Pembinaan Kampung KB	21.855.000,00	DOS
2.2.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	21.855.000,00	
2.2.93		Pengelolaan Kalurahan Inklusif	4.750.000,00	DOS
2.2.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	51.100.000,00	DOS
2.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	51.100.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	10.205.000,00	DOS
2.2.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.205.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	24.230.000,00	DOS
2.2.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	24.230.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>717.662.012,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	56.651.435,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	55.951.435,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	154.804.841,50	DDS, PBK, SDD
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.824.897,50	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	93.979.944,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	506.205.735,50	PBK, PBP, SDD
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	335.955.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	170.250.735,50	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>275.772.659,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	105.716.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	105.036.000,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	12.720.700,00	DDS
2.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000,00	
2.4.10	5.3.	Belanja Modal	12.690.700,00	
2.4.93		Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan Talut	110.707.003,00	DDS
2.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.101.000,00	
2.4.93	5.3.	Belanja Modal	106.606.003,00	
2.4.94		Pembangunan taman/rehabilitasi/pemeliharaan taman	46.628.956,00	PBH
2.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
2.4.94	5.3.	Belanja Modal	46.478.956,00	
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>208.999.800,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	32.625.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	29.265.000,00	
2.5.90		Pengelolaan Rumah Pilah Sampah / Bank Sampah Milik Kalurahan	52.890.000,00	DDS
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.890.000,00	
2.5.91		Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah	91.769.800,00	BMP, DDS
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.769.800,00	
2.5.92		Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan	31.715.000,00	BMP, DDS
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.715.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>60.105.078,00</b>	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	33.884.000,00	DDS
2.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	727.000,00	
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	33.157.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	16.500.000,00	DDS
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	16.500.000,00	
2.6.06		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	9.721.078,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	215.400,00	
2.6.06	5.3.	Belanja Modal	9.505.678,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	4.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	4.000.000,00	ADD
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>451.215.400,00</u></b>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	84.554.100,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.800.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	14.535.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.535.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	3.010.000,00	ADD
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.010.000,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	28.929.100,00	ADD
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.129.100,00	
3.1.92	5.3.	Belanja Modal	1.800.000,00	
3.1.94		Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	33.280.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.280.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	206.296.300,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	3.435.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.435.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	97.731.300,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.731.300,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	12.000.000,00	PAD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	40.800.000,00	PAD
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	40.800.000,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	28.830.000,00	ADD, PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.830.000,00	
3.2.91		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	23.500.000,00	PAD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	72.375.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	40.430.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.430.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	31.945.000,00	ADD, PAD, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.945.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	87.990.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.735.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.735.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	19.160.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.160.000,00	
3.4.90		Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan	37.280.000,00	ADD, PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.280.000,00	
3.4.93		Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	27.815.000,00	BMP, DDS
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.815.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>523.535.925,30</u></b>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	53.772.862,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	29.523.962,00	DDS
4.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.839.900,00	
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	15.684.062,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	24.248.900,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.248.900,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	247.920.515,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	9.430.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.430.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	5.885.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.885.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	106.051.015,00	DDS
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	105.301.015,00	
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	108.302.500,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.302.500,00	
4.2.95		Pemeliharaan Angkat Walet	18.252.000,00	DDS
4.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	256.000,00	
4.2.95	5.3.	Belanja Modal	17.996.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	89.117.048,30	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	18.668.620,30	PAD
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	
4.4.03	5.3.	Belanja Modal	18.618.620,30	
4.4.91		Pembinaan/Penyuluhan/Pendampingan Korban Kekerasan/KDRT/Bina Keluarga	4.175.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.175.000,00	
4.4.94		Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja/Keluarga	66.273.428,00	DDS



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.273.428,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	107.790.500,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	52.830.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.830.000,00	
4.5.90		Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha	54.960.500,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.960.500,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8.010.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	8.010.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.010.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	16.925.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	16.925.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.925.000,00	
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>478.195.361,70</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	243.072.716,70	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	235.000.000,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	235.000.000,00	
5.1.01		Sarana Prasarana Tanggap Darurat	8.072.716,70	PAD
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.072.716,70	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	14.922.645,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	14.922.645,00	ADD, PBK
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.922.645,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	220.200.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	205.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	205.200.000,00	
5.3.02		Bantuan Bahan Pangan	5.000.000,00	DDS
5.3.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.03		Bantuan Pendidikan	5.000.000,00	DDS
5.3.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.04		Bantuan Pengobatan	5.000.000,00	DDS
5.3.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>6.114.154.033,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(997.715.234,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.072.715.234,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>997.715.234,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tamantirto, 30 Desember 2022

Lurah Tamantirto







**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON KASIHAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN TAMANTIRTO**

*ꦑꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦏꦱꦶꦲꦤ꧀ꦧꦢꦤꦥꦺꦫꦩꦸꦱꦶꦮꦂꦠꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦠꦩꦤꦠꦶꦂꦠꦺ*

Jl. Kasihan-Bibis No 01 Telp 0274-370201 Kode Pos 55183  
Website: [tamantirto.bantulkab.go.id](http://tamantirto.bantulkab.go.id), e-mail: [desa.tamantirto@bantulkab.go.id](mailto:desa.tamantirto@bantulkab.go.id)

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN  
KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO  
NOMOR 12 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**MENJADI PERATURAN KALURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara RI Tahun 2016 No. 57);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman



Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 14);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);



29. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tamantirto Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019);
30. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2020 Nomor 16);
31. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2020 Nomor 17);
32. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17);
33. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 15);
34. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 16);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN  
KALURAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN  
KALURAHAN.

KESATU : Menyepakati rancangan peraturan kalurahan tentang Anggaran  
Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023  
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan  
ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai  
berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tamantirto

Pada tanggal : 20 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

KALURAHAN TAMANTIRTO

KETUA



( SURANTO )

## KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Suranto

Jabatan : Ketua Bamuskal Kalurahan Tamantirto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Wisnu Ardi

Jabatan : Lurah Tamantirto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Tamantirto selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang :

1. Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto Tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 Menjadi Peraturan Kalurahan.
2. Kepada Pemerintah Kalurahan untuk segera memohonkan Nomor Register Peraturan Kalurahan Kepada Kapanewon Kasihan.
3. Setelah Mendapatkan Nomor Register untuk segera Menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
LURAH TAMANTIRTO



WISNU ARDI

PIHAK KESATU  
KETUA BAMUSKAL



SURANTO



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KECAMATAN KASIHAN  
DESA TAMANTIRTO

ALAMAT : JL. KASIHAN NO.1  
KODE POS : 55183 PHONE : 0274.370201

LEMBAR DISPOSISI

INDEKS	KODE 145/712	NO. URUT 609	TGL. PENYELESAIAN
PERIHAL / ISI RINGKAS Keputusan penawar KKGan kab Bantul nomor: 42 Tahun 2022			
ASAL SURAT Kapasrawan KKG	TGL 26-12-22	NOMOR	LAMPIRAN
DITERUSKAN KEPADA	INSTRUKSI / INFORMASI		





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**KAPANEWON KASIHAN**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦴꦤ꧀ꦏꦱꦶꦲꦤ꧀

Alamat : Jl. Madukismo, No. 252, Tirtonirmolo, Kasihan Bantul 55181  
Telepon : (0274) 377597, Fax. (0274) 411275  
Email : kec.kasihan@bantulkab.go.id

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 145/712

Kepada Yth ;

1. Bupati Bantul
2. Inspektur Kab Bantul
3. Ka. Dinas PMKAL Setda Kab Bantul
4. Kabag Hukum Setda Kab Bantul
5. Lurah TAMANTIRTO
6. Bamuskal

di Bantul

NO.	YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Keputusan Panewu Kasihan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023	1 bendel	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
2	Keputusan Panewu Kasihan Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023	1 bendel	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
3	Keputusan Panewu Kasihan Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023	1 bendel	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kasihan, 26 Desember 2022

An. Panewu Kasihan

Jawa Bantul Kabupaten Bantul



**NURIYANTI, SST**

NIP. 197809061998032001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KAPANEWON KASIHAN**

*ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦏꦱꦶꦲꦤ꧀*

Alamat : Jl. Madukismo No 252 Tirtonirmolo Kasihan Bantul 55181,  
Telp. (0274) 377597, Fax. (0274) 411275  
Email : koc.kasihan@bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR : 42 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN**  
**TAMANTIRTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**PANEWU KASIHAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, wajib dimintakan evaluasi ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Kasihan tentang Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 38);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Siklus Tahunan Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);

26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Pada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Panewu ini.

KEDUA : Lurah Tamantirto bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto harus menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 7 hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

KETIGA : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,  
pada tanggal 26 Desember 2022

  
SUBARTA, S.Sos. M.Si.  
NIP. 196009271986081001

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul
2. Inspektur Kabupaten Bantul
3. Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Setda. Kab. Bantul
4. Kabag. Hukum Setda. Kabupaten Bantul
5. Bamuskal Tamantirto

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN

NOMOR : 42 TAHUN 2022

Tanggal : 26 DESEMBER 2022

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 Kalurahan telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan perundang-undangan.

II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN  
TAMANTIRTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

A. Legal Drafting

Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah disusun sesuai Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan.

B. Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan.

1. Pendapatan

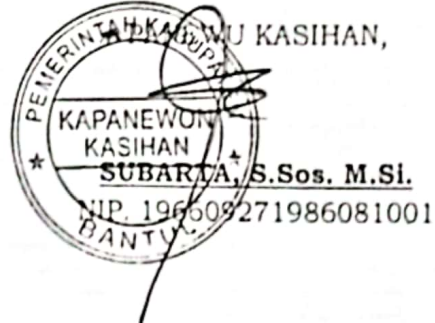
Penuangan dana transfer (dana Kalurahan, alokasi dana Kalurahan, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, Bantuan Keuangan baik dari Kabupaten, Provinsi dan Pusat) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja

Beberapa program dan kegiatan yang masuk dalam sinkronisasi program dan kegiatan APBKal dengan APBD sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022.

C. Nomor Register Peraturan Kalurahan

Noreg Peraturan Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul ( / Tamantirto/2022)





CEKLIST EVALUASI  
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO  
APBKAL TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	URAIAN	KETERANGAN
<b>A. Legal Drafting</b>		
1	Penggunaan huruf "bookman old style" dengan ukuran 12 dan spasi 1,5	Sudah
2	Kop Perdes dengan lambang Garuda	Sudah
3	Nomor register Kapanewon	
4	Nama pejabat Lurah / Camk tanpa gelar	Sudah
5	Kesesuaian Dasar Hukum	
6	UU NO 13 tahun 2021 Keistimewaan DIY	Sudah
7	UU NO 6 tahun 2014 Tentang Desa	Sudah
8	PP no 43 Th 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU no 6 th 2014	Sudah
9	PP no 60 th 2014 tentang DD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara	Sudah
10	Permendagri no 111 th 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa	Sudah
11	Permendagri no 114 th 2014 pedoman pembangunan desa	Sudah
12	Permendagri no 44 th 2016 tt Kewenangan Desa	Sudah
13	Permendagri no 20 th 2018 tentang pengelolaan keuangan desa	Sudah
14	Permendes PDTT No 21 th 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Sudah
15	Permendes PDTT No 8 th 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa th 2023	Sudah
16	PMK No 201/PMK 07/2022 tt Pengelolaan Dana Desa	Belum
17	Peraturan Gubernur DIY no 34 th 2017 tt pemanfaatan Tanah Desa	Sudah
18	Peraturan Gubernur no 2 th 2020 tt pedoman pemerintah kalurahan	Sudah
19	Peraturan Gubernur DIY no 100 th 2020 tt pedoman pelaksanaan BKK	Belum
20	Perda Kab. Bantul no 9 th 2019 tt penetapan Kalurahan	Sudah
21	Perda Kab. Bantul no 5 th 2020 tt Pamong Kalurahan	Sudah
22	Perda Kab. Bantul no 8 th 2020 tt Bamuskal	Sudah
	Peraturan Bupati Bantul no 38 th 2017 tt Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMMD) dan Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat (KB-PM)	Belum
23	Peraturan Bupati Bantul no 76 th 2019 tt Siklus tahunan Desa	Sudah
24	Perbup Bantul no.134 Tahun 2019 tt pedoman organisasi dan tata kerja pemerintahan kal. Sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bantul no. 128 th 2020	Sudah
25	Peraturan Bupati Bantul No. 86 th 2020 tt Kewenangan Kalurahan	Sudah
26	Peraturan Bupati Bantul No 87 th 2020 tt pedoman teknis penyusunan produk hukum kalurahan	Sudah
27	Peraturan Bupati Bantul no 134 th 2020 tt tata naskah dinas bagi pemerintah kalurahan	Belum
28	Perbup Bantul no 24 Tahun 2021 tt Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan dengan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan	Belum
29	Peraturan bupati bantul no 129 th 2021 tt penghasilan lurah, pamong kal, staff kal, staf honorer dan bamuskal	Sudah
30	Peraturan Bupati Bantul No. 180 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023	Belum
31	Perbup Bantul no. 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada Kalurahan	Sudah
32	Perbup Bantul no. 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan	Sudah
33	Peraturan Bupati Bantul no 59 th 2022 tt Pengelolaan keuangan desa	Sudah
34	Peraturan Bupati Bantul no 60 th 2022 tt tata cara pengadaan barang/jasa di kalurahan	Sudah
35	Peraturan Bupati Bantul no 103 th 2022 tt Pedoman Penyusunan APBKAL Tahun Anggaran 2023	Sudah
36	Peraturan Kal pemanfaatan tanah Kal	Belum
37	Peraturan Kal pungutan Kal	Belum
38	Peraturan Kal kewenangan kalurahan	Sudah
39	Peraturan Kal susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kalurahan	Sudah
40	Peraturan Kal tt KPJM Kal	Sudah
41	Peraturan Kal tt RKP kal	Sudah
42	Peraturan Kal tt Siltap	Sudah
43	Peraturan Kal tt BUM Kal	Belum
44	Peraturan Kal tt LKK	Sudah
<b>B. Substansi</b>		
1	Kesesuaian jumlah Dana Transfer	Sudah

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	Prioritas penggunaan Dana Desa utk Pemulihan Ekonomi nasional, Program Prioritas Nasional dan Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Nonalam	Sudah
2	sesuai kewenangan desa	
	Diarahkan untuk percepatan SDGs Desa	
	DD tidak diperkenankan untuk membangun gedung/kantor	
3	Belanja untuk menyelenggarakan kewenangan kalurahan	
	Paling sedikit 70 % untuk belanja bidang dan Penanganan Bencana, keadaan darurat dan mendesak	Sudah
	Paling banyak 30 % dari APBDK untuk mendanai siltap dan tunjangan lurah dan pamong serta bamuskal. Operasional Bamuskal	Sudah
4	Perkiraan SilPA Th lalu jika blm diketahui	Sudah
5	SilPA dari DD harus habis pada triwulan pertama	Sudah
	Kode rekening :	
	a. Belanja Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan : 1	Sudah
6	b. Belanja Bid. Pelaksanaan Pembangunan : 2	Sudah
	c. Belanja Bid. Pembinaan Kemasyarakatan : 3	Sudah
	d. Belanja Bid. Pemberdayaan masyarakat : 4	Sudah
	f. Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak : 5	Sudah
7	Kesesuaian Keg. Dengan Permendes PDPT No. 8 th 2022   BLT DD paling sedikit 10 % dan paling banyak 25%, dana operasional pemerintah desa 3%, memenuhi program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 %	Sudah
8	Penerima BLT DD : keluarga rentan sakit menahun/kronis, anggota keluarga tunggal lanjut usia dan/atau keluarga difabel	Sudah
9	Bantuan RTLH untuk warga miskin dan warga miskin ekstrim, maksimal 10 juta dalam bentuk material bangunan, jumlah minimal 6 penerima	Sudah
10	Mendukung stunting, KLA, Bantul Bersama dan Kabupaten Sehat	Sudah
C.	Persyaratan Kelengkapan Tambahan	
1	Keputusan Hasil musyawarah BAMUSKAL pembahasan dan penyepakatan perkal apbkal ( lihat tanggal keputusan )	Sudah
2	keputusan hasil musyawarah BAMUSKAL pembahasan dan penyepakatan perkal apbkal ( lihat Berita Acara Hasil Musyawarah )	Sudah
3	Peraturan Kal. tt RPJMKal	Sudah
4	Peraturan Kal. tt RKP kal	Sudah
Catatan :		
A. Peraturan yang belum mohon untuk dimasukkan dalam konsiderans		
B. Pada menimbang dan mengingat, diakhiri dengan tanda baca ;		
C. Pada menimbang dan mengingat, dalam satu peraturan tidak boleh terpisah menjadi 2 halaman		
D. UU nomor 6 Tahun 2014 tidak memakai angka 0		
E. Perbup 83/2019 pada konsiderans agar dihapus		
F. Rancangan Perkal APBDK harus diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi dari Kapanewon kemudian dimintakan nomor register		





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KECAMATAN KASIHAN  
DESA TAMANTIRTO

ALAMAT : JL. KASIHAN NO. 1  
KODE POS : 55183 PHONE : 0274.370201

LEMBAR DISPOSISI

INDEKS	KODE	NO. URUT	TGL. PENYELESAIAN
	45/713	60	
PERIHAL / ISI RINGKAS Nomor register peratutan Kabupaten			
ASAL SURAT	TGL	NOMOR	LAMPIRAN
Kepeneruan KSB	27-12-22		
DITERUSKAN KEPADA	INSTRUKSI / INFORMASI		
Ka Panggipyo / Danarto	- mohon untuk di fideles lanjut. 30/12/22		





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON KASIHAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦴꦤ꧀ꦏꦱꦶꦲꦤ꧀

Alamat : Jl. Madukismo, No. 252, Tamantirto, Kasihan Bantul 55181  
Telepon : (0274) 377597, Fax (0274) 411275  
Email : kec.kasihan@bantulkab.go.id

Nomor : 145/713  
Lamp : 1 lembar  
Hal : Nomor register peraturan  
kalurahan

Kepada Yth ;  
Lurah Tamantirto  
di Tamantirto

Menindaklanjuti surat saudara nomor 141/254 tanggal 26 Desember 2022 perihal Permohonan Register Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto bahwa berdasar Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 pasal 17,

ayat (2) Lurah mengajukan nomor register rancangan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Panewu sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami memberikan Nomor Register Peraturan Kalurahan Tamantirto Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, yaitu :

**26/Tamantirto/2022**

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Kasihan 27 Desember 2022



Tembusan Kepada Yth;  
1. Bamuskal Tamantirto